

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DAR KORUPSI (WBK)/WILAYAH BERSIH DAN MELAYANI (WBMM)
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Agama Negara dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Agama Negara dan Masyarakat	1. Ikut bersama Aparatur Pengadilan Agama Negara 2. Penandatanganan Naskah Ikut Bersama (Naskah Perjanjian) 3. Penandatanganan Piagam kesiapan Pembangunan Zona Integritas 4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara 5. Pembukaan kain selubung spanduk Pembangunan Zona Integritas	100% 100% 100% 100% 100%	
2	Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Kesiapan aparat Pengadilan Agama Negara sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Agama Negara menjadi wilayah Zona Integritas	1. Pembangunan rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Negara 2. Penyampaian kebijakan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang batas kelelahan dan larangan dalam pelaksanaan tugas 3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui website, spanduk, banner, dan radio	100% 100% 100%	

3	Mewujudkan terciptanya komponen Pengikut di Bidang Manajemen Perubahan	Penyusunan Kerja	Tim	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Menentukan aparat yang menjadi Tim 2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Pengadilan Agama Negara	100%	
		Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas		Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara	100%	
		Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas		Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas 2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi 3. Melaporkan Hasil Tindak Lanjut pemantauan dan Evaluasi	100%	
		Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja		Meningkatkan komitmen, pola pikir dan budaya kerja aparat Pengadilan Agama Negara	1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 2. Menunjuk sebagian Hakim dan Pegawai sebagai role model 3. Meningkatkan pelayanan satu atap dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan dengan para pihak yang berperkara 4. Menetapkan agen perubahan	100%	

				dengan membuat aturan pelanggaran adanya pertemuan aparat Pengadlian Agama Negara 5. Melibatkan semua aparat Pengadlian Agama Negara dalam Zona Integritas	100%	
4	Mewujudkan terciptanya komponen pengikut di Bidang Tataksana	Prosedur Operasional (SOP) Kegiatan Tetap E-Office Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadlian Agama Negara Meningkatkan Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan kinerja aparatur Pengadlian Agama Negara	1. Membuat SOP yang mengacu pada proses bisnis pada Pengadlian Agama Negara 2. Menerapkan SOP secara konsisten 3. Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi 1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi 2. Membuat aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIKEP, SAKPA, SIMAK BMN, dll) 3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadlian Agama Negara 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa surat keputusan Ketua Pengadlian Agama Negara	100% 100% 100% 100% 100% 100%	

				2. Membuat brosur, audio visual, spanduk dan banner dalam memberikan informasi kepada publik 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Negara	100%	
5	Menwujudkan terciptanya komponen pengikut di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia	Perencanaan kebutuhan pegawai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Agama Negara Pola Mutasi Internal Meningkatkan efektivitas manajemen SDM paratur pada Pengadilan Agama Negara	1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Negara 2. Membuat analisa beban kerja pegawai di Pengadilan Agama Negara 3. Memonitoring dan mengevaluasi rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Negara 1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara 2. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Negara 3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal 1. Mengusulkan aparatur Pengadilan Agama Negara untuk mengikuti Diklat maupun Pengembangan Kompetensi	100%	100%
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Meningkatnya Profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Agama Negara			

	Penetapan Kinerja Aparatur	Meningkatkan ketepatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadlian Agama Negara	- Melakukan pengembangan upaya kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadlian Agama Negara - Mengikutkan aparatur Pengadlian Agama Negara untuk mendapatkan sertifikat dibidang tugas masing-masing - Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur Pengadlian Agama Negara - Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerjaindividu level diatasnya - Melakukan pengukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu secara periodik - Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu	100%	
	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Meningkatkan Disiplin SDM aparatur pada Pengadlian Agama	- Membuat absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi dengan KOMDANAS - Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar - Mambuat surat ijin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari	100%	

		Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatkan transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadlian Agama Negara	Memutakhirkan data secara berkala pada SIKEP, SIMPEG Pengadlian Agama Negara	100%	
6	Mewujudkan terciptanya komponen pengikut di bidang akuntabilitas kinerja	Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya kinerja pada Pengadlian Agama Negara	1. Melibatkan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan 2. Melibatkan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja 3. Mamantau pencapaian kinerja secara berkala	100%	
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kinerja aparatur Pengadlian Agama Negara	1. Melibatkan Pimpinana secara langsung pada saat penyusunan perencanaan 2. Membuat indikator kinerja yang SMART 3. Menyusun Laporan Kinerja tepat waktu yang membuat informasi tentang kinerja 4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akunabilitas 5. Manempatkan aparatur yang telah memiliki setifikat dibidang pengelolaan akuntabilitas kinerja	100%	
7	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengikut di Bidang Penguatan Pengawasan	Pengendalian Gratifikasi	Tertindarnya penyalahgunaan	1. Membuat kampanye publik (public campaign) tentang pengendalian gratifikasi 2. Mengimplementasi pengendalian	100%	

	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opioni BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	gratifikasi di Pengadilan Agama	100%	
	Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhidnar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Agama Negara	1. Membangun pengendalian lingkungan di Pengadilan Agama Negara 2. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di Pengadilan Agama Negara 3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi 4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Agama Negara	100%	
	Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Agama Negara	1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat di Pengadilan Agama Negara 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	100%	
			1. Menetapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di Pengadilan Agama Negara 2. Mengevaluasi penerapan whistle blowing system di Pengadilan	100%	

		Penanganan benturan kepentingan	Menengkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Negara	Agama Negara - Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system - Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama - Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan - Mengimplementasikan penanganan kepentingan - Malakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan - Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan kepentingan	100% 100% 100% 100% 100% 100%	
8	Mewujudkan terciptanya komponen pengikut di bidang peningkatan pelayanan publik	Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan yang memperoleh standarasi internasional Agama Negara Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah	- Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negara - Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negara - Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negara - Melakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP di Pengadilan Agama Negara - Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetik dan capacity building di Pengadilan Agama	100% 100% 100% 100% 100%	

			dijangkau di Pengadilan Agama Negara	Negara	2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media	100%	
				3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	100%		
				4. Memiliki sarana pelayanan terpadu dan terintegrasi di Pengadilan Agama Negara	100%		
	Penilaian Kepuasan terhadap layanan	Meningkatnya indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Negara	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama	100%			
			2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka	100%			
			3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Negara	100%			
9	Menunjukkan indikator hasil di bidang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme	Nilai Korupsi Persepsi	1. Memfasilitasi pelayanan survey eksternal di Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	100%			
			2. Melakukan perhitungan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan di Pengadilan Agama Negara	100%			

10	Mewujudkan indikator hasil dibidang peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Agama Negara	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	100%	
----	---	-----------------------------------	---	--	------	--

Negara,
KETUA,
Februari 2020



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

**JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA NEGARA**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN 2020													KET
					5	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Agama Negara dalam pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Agama Negara dan Masyarakat	1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Agama Negara 2. Penandatanganan Naskah Ikrar Bersama (Naskah Perjanjian) 3. Penandatanganan Piagam kesiapan Pembangunan Zona Integritas 4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara 5. Pembukaan kain selubung spanduk Pembangunan Zona Integritas														
2	Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Kesiapan aparat Pengadilan Agama Negara sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Agama Negara menjadi wilayah Zona Integritas	1. Pembangunan rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Negara 2. Penyampaian kebijakan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang batas kebebasan dan larangan dalam pelaksanaan tugas 3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui website, spanduk, banner, dan radio 1. Menentukan aparat yang menjadi Tim 2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Pengadilan Agama Negara 1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona														
3	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengikut di Bidang Manajemen Perubahan	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Menentukan aparat yang menjadi Tim 2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Pengadilan Agama Negara 1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona														
		Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Menentukan aparat yang menjadi Tim 2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Pengadilan Agama Negara 1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona														

		Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara												
				3. Mensosialisasikan Rencana Pembangunan Zona Integritas												
				1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas												
				2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi												
				3. Melaporkan Hasil Tindak Lanjut pemantauan dan Evaluasi												
				1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pebangunan Zona Integritas												
				2. Menujnk sebagian Hakim dan Pegawai sebagai role model												
				3. Meningkatkan pelayanan satu atap dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan denga para pihak yang berpekara												
				4. Menetapkan agen perubahan dengan membuat pelanggaran adanya pertemuan aparat Pengadilan Agama Negara												
				5. Melibatkan semua aparat Pengadilan Agama Negara dalam Zona Integritas												
4	Mewujudkan terciptanya Komponen pengikut di Bidang Tataksana	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Terwujudnya pela proses penyelesaian tuga di Pengadilan Agmaa Negara	1. Membuat SOP yang mengacu pada proses bisnis pada Pengallan Agama Negara												Setiap Saat

[illegible]

	Budaya Pelayanan Publik	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Agama Negara	1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika dan capacity building di Pengadilan Agama Negara																
			2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media																
			3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar																
			4. Memiliki sarana pelayanan terpadu dan terintegrasi di Pengadilan Agama Negara																
			1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama																
	Penilaian Kepuasan terhadap layanan	Meningkatnya indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Negara	2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka																
			3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Negara																
			1. Memfasilitasi pelayanan survey eksternal di Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang																
9	Menunjukkan indikator hasil di bidang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme	Nilai Persepsi Korupsi	2. Melakukan perhitungan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan di Pengadilan Agama Negara																Sangat Kuat waktu

RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan transparan akuntabel efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat tepat dan profesional targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga pengadilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran Hasil tersebut perlu secara konkrit melaksanakan program reformasi birokrasi Pengadilan Agama Negara melalui upaya pembangunan zona integritas.

Kementerian pemberdayaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi telah menetapkan pedoman pembangunan zona integritas melalui peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani di instansi pemerintah selanjutnya untuk lebih memfokuskan pelaksanaan di Pengadilan Agama Negara maka perlu disusun rencana pelaksanaannya.

B. Maksud dan tujuan

1. Rencana pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pengajaran agama negara dalam membangun integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) wilayah birokrasi bersih melayani dalam kurung (WBBM)
2. Tujuan penyusunan rencana ini agar pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Negara fokus pada pencapaian tujuan sasaran dan indikator keberhasilan pencapaian dalam pembangunan integritas menuju WBK/bbm dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen perubahan penataan tatalaksana penataan manajemen SDM penguatan pengawasan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan

kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan meliputi tentang tujuan target dan indikator keberhasilan dari masing-masing zona integritas yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

D. Pengertian umum

Dalam rencana penyusunan ini yang dimaksud:

1. Zona integritas buka kurung ZI tutup kurung adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju wilayah bebas dari korupsi (menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi Sebagai sebagian besar manajemen perubahan penataan tatalaksana penataan sistem manajemen SDM penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan penataan tatalaksana penataan sistem manajemen SDM penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik

BAB II PELAKSANAAN

A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUNGKIT

Pembangunan komponen pengungkit meliputi : Manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Manajemen Perubahan.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Pengadilan Agama Negara menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas	a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan, hakim dan pegawai Pengadilan Agama Negara dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM. b. Wujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Negara sebagai zona integritas menuju wbk wbbm; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan	a. Penyusunan Tim Kerja Memperhatikan hal berikut : 1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Memperhatikan hal berikut : 1) Dokumen tancana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun 2) Dokumen rarrcana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Memperhatikan hal berikut : 1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokasi bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan 2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK. WBBM; 3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Memperhatikan hal berikut : 1) Pimpinan pengadilan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona

		Integritas menuju WBK/WBBM; 2) Agen perubahan telah ditetapkan; 3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun dilingkungan Pengadilan Agama Negara; dan 4) Seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
--	--	---

2. Penataan Tatalaksana

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, Proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien dan teratur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM	a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pengadilan b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pengadilan c. Meningkatnya kinerja	a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Mengacu pada kondisi : 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi; 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan; 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi b. E-Office Mengacu pada kondisi : 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi 3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi c. Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada kondisi : 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan. 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public.

3. Penataan Sistem Sumber Daya Manusia

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Penataan system manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur	a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi Mengacu pada kondisi : 1) Pengadilan Agama Negara telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja kualifikasi Pendidikan 2) Pengadilan Agama Negara telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai 3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dari evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai b. Pola Mutasi internal Mengacu pada kondisi : 1) Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal 2) Unit kerja telah menerapkan

		kebijakan pola mutasi eksternal 3) Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Mengacu pada kondisi : 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) 2) Terdapat kesempatan/hak bagi hakim dan pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun kompetensi lainnya. d. Penetapan Kinerja Individu Mengacu pada kondisi : 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; 2) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic 4) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan implementasi dan pemantauan e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan f. System Informasi Kepegawaian Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
--	--	---

4. Penguatan Akuntabilitas

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan Kewajiban Pengadilan Agama Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan	a. Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pengadilan	a. Keterlibatan pimpinan Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi sebagai berikut: 1) Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan 2) unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan 3) pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja		Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, laporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator dibawah ini: 1) Pengadilan Agama Negara telah memiliki dokumen perencanaan 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria specific, Measurable, achivable, relevan and Time bound (SMART). 4) Pengadilan Agama Negara telah menyusun laporan kerja tepat waktu 5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja 6) Pengadilan Agama Negara telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
--	--	---

5. Penguatan Pengawasan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Penguatan pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN	a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara d. Menurunnya Tingkat penyalahgunaan wewenang	a. Pengendalian gratifikasi mengacu pada kondisi: 1) Pengadilan Agama Negara memiliki public campaign terhadap pengadilan gratifikasi 2) Pengadilan Agama Negara telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi b. Penerapan sistem pengawasan internal pengadilan (SIPP) mengacu pada kondisi: 1) Pengadilan Agama Negara telah telah membangun lingkungan pengendalian 2) Pengadilan Agama Negara telah melakukan penilaian risiko atas unit 3) Pengadilan Agama Negara telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir Resiko yang telah diidentifikasi 4) Pengadilan Agama Negara telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sipp kepada seluruh pihak terkait c. Pengaduan masyarakat mengacu pada kondisi: 1) Pengadilan Agama Negara mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat 2) Pengadilan Agama Negara telah melaksanakan tindak lanjut atas

		hasil penanganan pengaduan masyarakat 3) Pengadilan Agama Negara telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 4) Pengadilan Agama Negara telah Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat d. Whistle Blowing System mengacu pada kondisi: 1) Pengadilan Agama Negara telah menerapkan Whistle blowing system 2) Pengadilan Agama Negara telah melakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system 3) Pengadilan Agama Negara Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle blowing system e. Penanganan Benturan Kepentingan Mengacu pada kondisi: 1) Pengadilan Agama Negara telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2) Pengadilan Agama Negara sosialisasi penanganan benturan kepentingan 3) Pengadilan Agama Negara telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan 4) Pengadilan Agama Negara telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 5) Pengadilan Agama Negara telah Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
--	--	--

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Agama Negara secara berkala sesuai kebutuhan	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat lebih murah lebih aman dan lebih mudah dijangkau) b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional	a. Standar pelayanan mengacu pada kondisi. 1) Pengadilan Agama Negara telah memiliki kebijakan standar pelayanan 2) Pengadilan Agama Negara telah memaklumkan standar pelayanan 3) Pengadilan Agama Negara telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan sop b. Budaya pelayanan prima mengacu

dan harapan masyarakat Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik	c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	pada kondisi: 1) Pengadilan Agama Negara telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik estetika capacity building dan upaya penerapan budaya pelayanan prima 2) Agama negara telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 3) Agama negara telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 4) Pengadilan Agama Negara telah memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi 5) Pengadilan Agama Negara telah melakukan inovasi pelayanan c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan mengacu pada kondisi: 1) Pengadilan Agama Negara telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 2) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka 3) Pengadilan Agama negara telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
--	---	--

B. Pembangunan komponen hasil

Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani	a. Terwujudnya pengadilan yang bersih dan bebas KKN b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) b. Persentase penyelesaian (TLHP) tindak lanjut hasil pengawasan Nilai persepsi kualitas pelayanan survei eksternal

Ditetapkan di : Negara
Pada Negara : Februari 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.



**PENGADILAN AGAMA NEGARA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR W15-A11/077/Kp.04.5/1/2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :
- a. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama Negara memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan sasaran dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani dalam lingkup Pengadilan Agama Negara;
 - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih melayani pada Pengadilan Agama Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Peraturan Menteri Pengguna dayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di LingkunganInstansi Pemerintah.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Zona Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik indonesia.
 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Ser/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG
RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

- Pertama : Rencana pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Negara sebagaimana terlampir;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN di : Negara

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip.